

**LAPORAN KINERJA PIMPINAN DPR RI
MASA PERSIDANGAN KE IV TAHUN SIDANG 2015 - 2016.**

WAKIL KETUA DPR RI/KORPOLKAM

Kegiatan Wakil Ketua DPR RI /Korpolkam pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016 dari tanggal 6 April 2016 s.d 16 Mei 2016, Dalam 4 (empat) Masa Persidangan tersebut telah melakukan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. **SELASA, 26 April 2015, MEMBERIKAN SAMBUTAN PADA RAKERNAS HKTI 2016 DALAM RANGKA HUT KE-43 HKTI & PELANTIKAN PENGURUS DPN HKTI 2015-2020 “PROGRAM DAN AKSI NYATA HKTI MENINGKATKAN NILAI TUKAR PETANI”di HOTEL RED TOP JAKARTA.**

Pada Rakernas HKTI 2016 kali ini, yang sekaligus berdekatan dengan hari ulang tahun ke-43 HKTI (tepatnya HKTI lahir pada 27 April 1973), acara kita mengambil tema “**Program dan Aksi Nyata HKTI Meningkatkan Nilai Tukar Petani**”. Isu soal Nilai Tukar Petani adalah pokok keprihatinan HKTI, dan ini adalah isu yang memang mendasar.

Sejauh ini, jika kita berbicara baik mengenai pembangunan ekonomi, maupun pembangunan pertanian, selalu hanya didekati dari sisi pendekatan produksi atau konsumsi secara agregat saja, dan sangat sedikit sekali memperhatikan aspek “**aktor**” atau “**manusia**”-nya, dalam hal ini rakyat secara umum, atau rakyat tani secara khusus.

Hampir tiga puluh tahun silam, David Korten menulis sebuah risalah pendek yang kemudian menjadi terkenal, *People-Centered Development: Reflections on Development Theory and Method* (1983), sebuah risalah yang pernah ramai dibicarakan di Indonesia pada dekade 1980-an.

Namun, meski telah tiga dekade berlalu, pada hari ini kita masih saja berhadapan dengan persoalan klise dari pembangunan tadi, yaitu bahwa pembangunan masih saja dimaknai sebagai soal produksi-*output*, dan bukan soal “manusia”. Atau, meminjam istilah yang sering digunakan oleh Sri-Edi Swasono (2009), yang dibangun masih saja “ekonomi”, dan bukan “manusia”-nya. Ini bisa dilihat dari indikator pembangunan yang selalu dibanggakan yang tetap saja bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sebagai ukuran.

Persis pada persoalan ini, gagasan *Ekonomi Kerakyatan* yang dibangun Mohammad Hatta dulu terus mendapatkan pembuktian atas relevansinya, karena memberikan bobot dan perhatian yang sangat besar pada aspek *aktor* atau *manusia* dalam kegiatan perekonomian. Secara semiotik, pada istilah “ekonomi kerakyatan”, misalnya, rakyat diposisikan sebagai aktor penting yang perlu dibela dan diberdayakan, mengingat posisinya yang rentan terpinggirkan.

Keterpinggiran mereka, dan juga ketakberdayaannya, oleh karena bukanlah sebuah kondisi natural (*original condition*), melainkan merupakan resultan dari problem-problem struktural

dan historikal yang selama ini membelenggu mereka, menjadi persoalan ekonomi yang harus diatasi. Dengan demikian, maka kegiatan pembangunan kemudian harus berpusat pada rakyat (*people-centered development*), atau berbasis pada masyarakat.

Tentu saja, negara dan pasar juga tetap mendapatkan perannya, namun peran itu tidak mengubah substansi bahwa pusatnya adalah rakyat. Model politik-ekonomi yang menempatkan rakyat pada posisi sentral dalam kegiatan ekonomi suatu negara inilah yang disebut sebagai *Ekonomi Kerakyatan*, yang dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas disebut sebagai *demokrasi ekonomi (economic democracy)*.

Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, soal rakyat itu tentu saja menjadi lebih spesifik lagi, yaitu “**rakyat tani**”. Pembangunan pertanian mestinya tidak lagi hanya dimaknai sebagai memperbesar produksi output, melainkan pada bagaimana memperbesar kemakmuran rakyat tani, yang salah satu indikatornya diukur dengan Nilai Tukar Petani tadi.

Itu sebabnya, tema Rakernas HKTI 2016 ini sangat tepat, karena menempatkan persoalan mendasar tadi, soal nasib petani, pada posisi yang dipentingkan.

Pada waktu saya terpilih menjadi Ketua Umum HKTI akhir 2015 silam, saya sudah menegaskan bahwa petani adalah kunci kemakmuran negeri. Pertanian masih merupakan sektor penyerap angkatan kerja terbesar, yang menyerap sekitar 35,76 juta orang, atau sekitar 30,2 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional rata-rata 10,26 persen dengan pertumbuhan sekitar 3,9 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor manufaktur.

Jika dikelola dengan benar, sektor pertanian merupakan motor pertumbuhan daya beli masyarakat. Apalagi, dalam jangka pendek, soal utama perekonomian kita saat ini adalah terus merosotnya daya beli masyarakat tadi, terutama sesudah berbagai kebijakan pencabutan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah sejak 2014 silam.

Konsumsi sektor rumah tangga merupakan kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi. Bayangkan seandainya kita mengelola sektor pertanian secara benar, *multiplier effect*-nya sangat besar. Kita akan melihat rumah tangga petani menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi negeri.

Soal daya beli rakyat dan Nilai Tukar Petani ini memang perlu dilihat secara jernih, karena seringkali kita selama ini menempatkan persoalan tersebut secara keliru. Kita selalu menuntut harga pangan murah, misalnya, tanpa memperhatikan bahwa harga pangan itu merupakan instrumen pembentuk nilai tukar bagi para petani produsen. Bagaimana Nilai Tukar Petani akan meningkat, jika insentif harga yang mereka terima sangat rendah?!

Saya berpendapat bahwa masalah pokok terkait pangan di Indonesia, misalnya, tidak terletak pada bagaimana caranya “*menurunkan harga pangan*”, melainkan pada bagaimana “*menyediakan pangan*” di pasaran yang “*dapat dibeli*” oleh rakyat banyak.

Artinya, berapapun tingkat harga pangan, jika rakyat banyak memiliki daya beli (*purchasing power*), maka hal itu tentunya tidak akan menjadi persoalan. Dengan sendirinya, isu mengenai pangan murah pun menjadi tidak relevan, dimana petani produsen selalu menjadi korbannya.

Penghubungan soal produksi pangan dengan daya beli petani inilah yang banyak absen dalam analisis mengenai soal ketahanan pangan hingga saat ini. Kita alpa bahwa dalam kaitannya dengan daya beli rakyat tani, daya beli mereka sangat terkait dengan tingkat harga dari *output* yang dihasilkannya, dan itu adalah harga pangan itu sendiri.

Model argumentasi seperti ini, khusus mengenai bahan pangan beras, pada masa lalu pernah disebut sebagai “politik harga beras yang memakmurkan rakyat” oleh Mohammad Hatta. Menurut Hatta, kenaikan harga *output* hasil produksi desa, teristimewa padi dan beras, merupakan tiang dari politik-kemakmuran orang desa, dimana dengan surplus kemakmuran itu perekonomian desa akan dengan sendirinya membantu perkembangan perekonomian kota.

Menurut cara pandang ini, perekonomian desa yang bertumpu pada sektor pertanian dianggap memainkan fungsi unik yang berbeda dengan fungsi yang dimainkan perekonomian kota. Surplus ekonomi yang terjadi di desa selalu akan merupakan faktor pendorong bagi perkembangan perekonomian kota, tapi hubungan itu tidak berlaku sebaliknya, dimana pertumbuhan ekonomi kota tidak akan berimbas kepada perekonomian desa.

Sebagai organisasi petani, HKTI menyadari bahwa ke depan isu pangan akan semakin menjadi isu penting, bersama dengan isu energi dan air. Dan tiga isu tadi secara kebetulan saling kait-mengait dengan sektor pertanian. Pertanian bukan hanya merupakan sumber pangan, tapi juga sumber energi. Oleh karenanya sangat keliru jika kita menyepelkan sektor pertanian. Itu sebabnya HKTI sangat *concern* pada upaya peningkatan kapasitas petani, baik *skill* teknis, manajerial, maupun adopsi teknologi. Begitu juga dengan soal-soal kelembagaan pertanian.

Dan di luar aspek teknikalitas itu, membicarakan pembangunan pertanian tanpa memperhatikan insentif bagi para petani adalah omong kosong.

Tema Rakernas HKTI 2016 ini ingin mengingatkan kita bahwa rakyat kecil, terutama rakyat tani, adalah primat dalam pembangunan. Posisi mereka, meminjam istilah Sri-Edi Swasono, adalah **sentral**, dan bukannya **residual**. Rakyat tani harus ditempatkan sebagai subyek penting, dan bukan sekadar obyek penderita dari pembangunan ekonomi dan pembangunan pertanian.

Akhir kata, semoga berangkat dari Rakernas HKTI 2016 ini, kita bisa merumuskan peran HKTI yang lebih nyata dan lebih berdampak bagi kehidupan petani Indonesia.

2. KAMIS, 28 APRIL 2016 SAMBUTAN SEMINAR NASIONAL PENGUATAN BADAN KEAHLIAN DALAM RANGKA PERCEPATAN REFORMASI DPR RI, DI GEDUNG DPR RI.

Konsolidasi sistem demokrasi di Indonesia yang berjalan cukup baik, melahirkan dorongan yang sangat kuat kepada institusi-institusi demokrasi untuk melakukan pembenahan. Dorongan tersebut muncul dalam bentuk harapan publik kepada lembaga-lembaga negara untuk lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat politik Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, DPR RI menyadari pentingnya melakukan transformasi demi merespon tuntutan dari masyarakat politik Indonesia yang semakin kritis. Oleh karenanya, salah satu agenda strategis yang dicanangkan oleh pimpinan DPR RI di awal periode 2014-2019 adalah mewujudkan DPR RI sebagai parlemen modern. Wujud dari semangat mereformasi DPR. Sebab, kami melihat bahwa perkembangan sistem demokrasi yang semakin modern membutuhkan parlemen yang modern pula.

Roobin Cook dalam artikelnya “A Modern Parliament in a Modern Democracy”, tahun 2001 menyatakan ada tiga aspek utama dalam parlemen modern. Pertama yaitu tingkat partisipasi publik dan keterbukaan informasi yang tinggi, optimalisasi penggunaan teknologi informasi digital, dan memaksimalkan fungsi representasi. Semangat inilah yang saat ini kita wujudkan dalam penguatan kelembagaan DPR RI menuju parlemen yang modern, yang lebih terbuka dan lebih dekat kepada masyarakat.

Dalam rencana strategis DPR RI 2015-2019, gagasan parlemen modern mengarah pada optimalisasi fungsi representasi, legislasi, anggaran dan pengawasan. DPR juga didorong untuk lebih responsif serta membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi publik. Terlebih di era digital saat ini, DPR diharapkan dapat lebih mudah diakses, terbuka, dan transparan, dan DPR yang mampu menjangkau publik yang lebih luas.

Semangat menuju parlemen modern sebenarnya juga sudah diamanatkan dalam UU MD3. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), diperlukan penataan Organisasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. Dan pada tanggal 2 Maret 2015 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga, dari sisi pengaturan hukum kelembagaan sistem pendukung DPR saat ini sudah lebih baik.

Peran Badan Keahlian dalam sebuah kelembagaan parlemen, memainkan peranan yang sangat sentral. Terutama sebagai tulang punggung parlemen dalam mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang keahlian. Mulai dari penyiapan perumusan perancangan undang-undang, melakukan dukungan kajian anggaran, serta perumusan dukungan penelitian kepada anggota, fraksi, dan alat kelengkapan dewan.

Terlebih lagi jika kita lihat tantangan yang dihadapi oleh DPR saat ini. Peranan Badan Keahlian semakin mendesak untuk dioptimalisasi. Perhatian dan harapan masyarakat terhadap peningkatan kinerja, baik secara kuantitas maupun kualitas, kepada DPR semakin besar. Seperti tidak tercapainya target produk legislasi DPR, masih cukup banyaknya UU yang di judicial review akibat berbenturan dengan produk legislasi lainnya, serta berbagai hal lainnya yang terkait dengan fungsi pengawasan dan anggaran. Meskipun apa yang diberitakan di dalam media mengenai persepsi masyarakat terhadap DPR tidak semuanya tepat, namun hal tersebut dapat kita jadikan latar belakang untuk meningkatkan kinerja kelembagaan DPR.

Saat ini DPR RI memiliki target kinerja yang tidak mudah. Misalnya saja di bidang legislasi, target Prolegnas DPR hingga 2019 kurang lebih berjumlah 169 RUU. Khusus untuk tahun 2016, terdapat 40 RUU Prolegnas yang menjadi target legislasi DPR. Tentu target ini bukanlah target yang mudah dicapai, terlebih lagi jika kita ingin menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Oleh karenanya dukungan dari Badan Keahlian merupakan satu kebutuhan yang serius, terutama dalam mempersiapkan dan mengkaji naskah akademik terhadap RUU yang inisiatifnya hadir dari DPR.

Sebab, salah satu problem hambatan dalam proses legislasi kita adalah tidak semua RUU sudah didasari dan dilengkapi dengan naskah akademik yang matang. Ketiadaan naskah akademik sering berdampak pada munculnya kesulitan-kesulitan dalam pembahasan sehingga memakan waktu sangat lama pada saat pembahasan.

Di era demokrasi yang semakin modern membutuhkan parlemen yang modern. Dan untuk membentuk parlemen yang modern dibutuhkan dukungan keahlian yang kuat. Saat ini Badan Keahlian kita sudah dilengkapi dengan pembentukan unit pusat untuk dukungan keahlian pokok. Seperti pusat perundang-undangan, pusat analisa anggaran, pusat akuntabilitas, dan pusat penelitian. Harapan saya dengan adanya unit pusat tersebut, kinerja Badan Keahlian dapat lebih fokus dalam memberikan dukungan keahlian pada setiap fungsi-fungsi DPR.

3. SENIN, 2 MEI 2016, SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN TEMA “REVOLUSI MENTAL” DI UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK.

- 1) Ide “Revolusi Mental” pertama kali ditulis oleh Presiden Joko Widodo pada saat ia masih calon presiden. Ia menulis sebuah artikel di Harian *Kompas*, 10 Mei 2014, dengan judul “Revolusi Mental”. Secara kebetulan, pada tanggal yang sama, di Harian *Koran Sindo*, juga muncul tulisan dengan judul yang sama yang ditulis oleh Benny Susetyo.
- 2) “Revolusi Mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama Pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik.” Begitulah pengertian yang kita baca atas “Revolusi Mental” yang menjadi agenda pemerintah. Apa yang membuat Revolusi Mental menjadi urgen, jika kita baca keterangan dari sumber-sumber resmi yang bisa menjelaskan konsep tersebut, adalah persoalan-persoalan seperti sikap rakus pejabat, perilaku tidak mau antri, dan sejenisnya.
- 3) Gagasan “Revolusi Mental” dibentuk atas dasar kebutuhan terhadap pembangunan mental masyarakat Indonesia yang sebelumnya absen dari agenda pembangunan nasional.

Pembangunan yang dijalani selama ini hanya fokus pada dimensi kelembagaan saja namun lupa pada dimensi manusianya. Situasi ini tidak lain, menurut Jokowi, dikarenakan negara berjalan di atas sistem yang liberal baik secara politik maupun ekonomi. Ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pelanggaran hukum menjadi problem yang mengiringi perjalanan pembangunan Indonesia pada 16 tahun terakhir. Sehingga, revolusi mental merupakan satu bentuk gagasan korektif terhadap praktik sistem politik dan ekonomi yang sangat liberal, yang menegasikan sentuhan mental dalam agenda pembangunan.

- 4) Secara normatif, persoalan-persoalan yang disebut sebagai latar belakang kenapa Revolusi Mental diperlukan tadi memang adalah persoalan-persoalan penting yang mendesak untuk segera diatasi. Hanya persoalannya kemudian benarkah “mental” bisa dijadikan obyek “revolusi”? Apakah mental bisa direkayasa melalui “rekayasa atas mental” itu sendiri, secara *per se*; ataukah “mental” sebenarnya hanya bisa direkayasa melalui rekayasa atas hal-hal yang lebih “struktural dan material” lainnya, dan bukan kepada mentalnya itu sendiri?!
- 5) Jika kita menengok kembali ke belakang, dulu Bung Karno juga berbicara mengenai revolusi mental. Tapi dia membicarakan konsep "mental" itu bukan dengan pendekatan “psikologisme” atau pendekatan sebagaimana yang menjadi *concern* para konsultan pengembangan kepribadian, tapi mental sebagaimana yang diproduksi oleh problem struktural kolonialisme.
- 6) Kolonialisme, yang menganut sejenis politik *apartheid* di dalamnya, baik di wilayah politik, ekonomi, maupun pendidikan, yang kesemuanya bersifat diskriminatif terhadap kaum Bumiputera, memang telah men-*downgrade* dan merusak mental bangsa. Namun, dulu Bung Karno tidak pernah membicarakan persoalan “mental” tadi sebagai persoalan “mental *per se*”, melainkan melalui pembahasan atas problem-problem struktural yang telah melahirkan mentalitas tersebut. Itu sebabnya jargon “*national character building*” yang menjadi agenda indoktrinasi di masa lalu kemudian berisi materi-materi yang sanggup mengantarkan orang kepada pemahaman yang bersifat struktural-material atas situasi politik, ekonomi, dan kebudayaan yang mengelilinginya. Kesadaran yang bersifat struktural itulah yang kemudian diharapkan bisa mentransformasikan orang kepada perubahan karakter tadi. Jadi, soal karakter dan sikap kebangsaan tadi tidak pernah dibahas melalui pendekatan "psikologisme" ala ahli-ahli pengembang kepribadian.
- 7) Jika diskusi soal mental anak bangsa sebagaimana yang menjadi obyek “Revolusi Mental” pada hari ini analisisnya kembali lagi ke soal “psikologisme” tadi, atau paling jauh kepada analisis yang bersifat “etnologis”, menurut saya pemahaman dan analisis kita mengenai persoalan kebangsaan berarti telah mengalami kemunduran, karena kerangka analisis tadi telah membuat kita mundur lagi ke zaman prawacana modernisasi sebagaimana yang dulu, misalnya, didengungkan oleh generasinya almarhum Profesor Koentjaraningrat ketika awal kita melakukan proyek *developmentalisme*. Bahkan dulupun pendekatan itu telah mendapatkan kritik dari para intelektual kita, maka menjadi pertanyaan jika pada hari ini analisis kita kembali lagi pada pendekatan itu dengan tanpa problematisasi sama sekali.
- 8) Menurut Koentjaraningrat, sikap mental orang Indonesia umumnya belum siap untuk pembangunan. Itu sebabnya gagasan mengenai pembangunan berbasis kebudayaan kemudian mulai diperkenalkan sebagai sebuah pendekatan. Koentjaraningrat mengatakan bahwa mentalitas bersumber pada sistem nilai budaya. Ia menggambarkan sikap mental yang dipandang sebagai kelemahan bangsa Indonesia yang perlu diubah, yaitu (a) Sifat mentalitet yang meremehkan mutu, (b) Sifat mentalitet yang suka menerabas; (c) Sifat

tidak percaya kepada diri sendiri; (d) Sifat tidak berdisiplin murni; dan (e) Sifat tidak bertanggung jawab.

- 9) Jika menggunakan pendekatan Bourdieu, maka yang perlu berubah adalah *habitus* atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Mekanisme perubahan habitus itu harus secara *implisit* (persuasif) dan tidak *afirmatif* (diktator) untuk menghindari reaksi balik berupa resistensi. Perubahan habitus akan terlihat dari adanya kesukarelaan aktif untuk melakukan perubahan. Fenomena mengenai mentalitas negatif masyarakat Indonesia, sebenarnya bukan mentalitas yang partikular. Artinya situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pola pembangunan dengan mengadopsi sistem liberal, cenderung menghasilkan masyarakat yang sangat rentan. Inilah yang oleh Ulrich Beck disebut dengan “Masyarakat Risiko”.
- 10) Setidaknya terdapat tiga macam risiko yang di sebutkan oleh Beck pada struktur masyarakat modern, antara lain (a) risiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), (b) risiko sosial (*social risk*), dan (c) risiko mental (*psyche risk*). Dari pemikiran Beck mengenai risiko juga berimbas pada beberapa kelas sosial yang menjadi korban. Hal tersebut terjadi akibat sejarah distribusi risiko itu sendiri, sebagaimana kekayaan risiko melekat pada pola kelas, hanya saja yang terjadi adalah kebalikannya. Kekayaan terakumulasi di puncak sementara risiko akan terakumulasi di dasar atau bawah.
- 11) Muncul kembalinya “pendekatan mentalitas” di kalangan pemerintah ini bagi saya menerbitkan tanda tanya besar. Dalam persepsi publik, rezim pemerintahan saat ini sebenarnya cukup banyak diisi atau dipengaruhi oleh aktivis-aktivis yang bisa disebut “Kiri”, yang tentunya menguasai perangkat analisis yang bersifat struktural. Namun alih-alih memunculkan analisis yang bersifat struktural-material, jargon yang dikemukakan oleh pemerintahan saat ini justru berangkat dari “pendekatan mentalitas” tadi.
- 12) Apa yang dimaksud sebagai analisis yang bersifat struktural atau material tadi akan lebih jelas dipahami melalui contoh kasus. Mari berangkat dari contoh yang aktual, terkait dengan merajalelanya politik uang dalam dunia politik kita, misalnya. Apakah merajalelanya politik uang merupakan gejala mental? Saya kira tidak sepenuhnya demikian. Politik uang itu merupakan cermin dari mahalnya desain sistem politik kita hari ini. Dengan sistem pemilihan umum yang bersifat proporsional terbuka di semua level pemilihan, baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, maupun DPR RI, sistem politik kita persis menjadi apa yang dulu pernah disebut oleh Bung Hatta sebagai “*free fight democracy*”. Tarung bebas dalam pemilihan umum tidak lagi terjadi antar-partai politik, melainkan terjadi antar-kandidat di dalam sebuah partai politik. Di satu sisi, memang ada kebaikan dari desain sistem yang demikian, dimana orang bisa berkompetisi secara terbuka tanpa ada hirarki, misalnya, senioritas kader atau sejenisnya. Namun, sistem yang demikian membuat politik kita akhirnya jadi sangat mahal dan transaksional.
- 13) Jadi, kembali lagi, apakah maraknya politik uang dalam sistem politik kita sebagaimana yang dibahas tadi merupakan gejala mental atau merupakan gejala struktural? Mana yang merupakan primat, dan mana yang merupakan subset? Mana yang lebih mungkin untuk diperbaiki, mental orang, dalam hal ini politisi, atau memperbaiki desain sistem politiknya?! Persis di situlah maksud pendekatan struktural yang telah disebut sebelumnya.
- 14) Berangkat dari bangunan premis yang dibangun oleh pemerintahan saat ini dalam merumuskan ide “Revolusi Mental”, maka semestinya orientasi kebijakan pemerintah saat ini dapat memberikan warna berbeda dari praktik yang sudah dijalankan sebelumnya.

Namun faktanya, operasionalisasi ide revolusi mental menghadapi hambatan yang sangat fundamental, yakni krisis figur di tataran elit yang mengusung ide tersebut.

- a. Proses penyusunan kabinet dan posisi strategis negara berdasarkan prinsip bagi-bagi kursi kepada kelompok pendukung. Dimana hal ini sebelumnya ditentang keras oleh presiden Jokowi pada saat kampanye.
- b. Saling menyalahkan, menjatuhkan dan kritik antara menteri di ruang publik yang menyebabkan kegaduhan politik.
- c. Proses penegakkan hukum yang masih tebang pilih. Kasus terakhir bisa kita lihat dari laporan BPK perihal penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta.
- d. Liberalisasi kebijakan buruh kasar asing yang mengancam kesejahteraan buruh domestik.

15) Tanpa analisis yang bersifat struktural, pendekatan “psikologisme” untuk membahas soal mental ini saya kira tidak akan melahirkan *multiplier effects* yang berarti. Sehingga, yang kita butuhkan sebenarnya bukanlah revolusi mental, tapi revolusi struktural. Tanpa revolusi struktural, kita hanya akan memandang dan menilai anak bangsa kita hanya dari sudut pandang kecurigaan ala orientalisme belaka.

4. **SABTU, 7 MEI 2016, SEBAGAI PEMBICARA DAN MEMBUKA SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA “ KEDAULATAN PANGAN HARGA MATI” DALAM RANGKA PEMBUKAAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) PEMUDA TANI HKTI DI HOTEL KARTIKA CANDRA JAKARTA.**

“Pulau Jawa adalah tanah pertanian yang besar; tanahnya adalah sumber besar kekayaannya... beras merupakan bahan pangan utama seluruh penduduknya serta bahan pokok pertaniannya... sebagai persediaan makanan manusia, bahan utama sesudah beras adalah jagung.”

Sewaktu meresmikan pendirian Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI) di Bogor, 27 April 1952, yang kemudian berubah menjadi Institut Pertanian Bogor (IPB), Presiden Soekarno memberi judul pidato sambutannya “Soal Hidup dan Mati”. Dalam pidato yang sengaja dibuat tertulis itu, supaya isi pidato itu segera bisa disebar kepada para pemuda Indonesia di seluruh tanah air, Bung Karno sangat menekankan pentingnya para pemuda Indonesia untuk belajar pertanian, peternakan, serta ilmu-ilmu agro-kompleks lainnya, karena dalam bidang-bidang keilmuan itulah terletak soal hidup dan matinya bangsa.

Sebuah bangsa yang tidak sanggup memberi makan rakyatnya secara layak, atau yang tidak sanggup memenuhi serta menyediakan kebutuhan pangannya sendiri, kedaulatannya pasti mudah sekali rontok. Itu sebabnya, menurut Bung Karno, soal pangan adalah soal yang mendesak untuk dipecahkan, tidak bisa ditunda atau diulur-ulur.

Sesudah 64 tahun lebih sejak “Soal Hidup dan Mati” itu diperingatkan Bung Karno, dalam kenyataannya Indonesia hingga saat ini masih belum juga bisa terlepas dari ancaman ketersediaan pangan. Kalau kita lihat, laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan produksi pangan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia rata-

rata adalah 1,49% per tahun, sedangkan laju produksi pangan kita rata-rata hanya tumbuh 0,3% per tahun.

Indeks ketahanan pangan Indonesia, sebagaimana yang diukur dalam *Global Food Security Index*, juga terus merosot, dari posisi ke-62 dari 105 negara (skor antara 0-100) pada 2012, anjlok ke posisi ke-74 dari 109 negara pada 2015. Kedaulatan pangan Indonesia kian rapuh dan rentan oleh fluktuasi harga pangan dunia dan perubahan iklim yang sulit diantisipasi.

Di luar soal laju pertumbuhan penduduk dan produksi pangan yang timpang itu, terus menurunnya jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia juga merupakan ancaman lainnya terhadap ketahanan pangan Indonesia. Pada 2003, jumlah rumah tangga petani masih 31,17 juta. Sepuluh tahun kemudian (2013), menurut Sensus Pertanian, jumlahnya menyusut jadi 26,13 juta, alias. turun sekitar 5 juta selama sepuluh tahun. Atau, kalau dirata-rata 1,75 persen per tahun.

Hasil Sensus Pertanian 2013 juga menunjukkan bahwa rumah tangga petani rata-rata hanya menguasai 0,89 hektar, dan khusus untuk sawah rata-rata cuma 0,39 hektar.

Rendahnya Kesejahteraan Petani

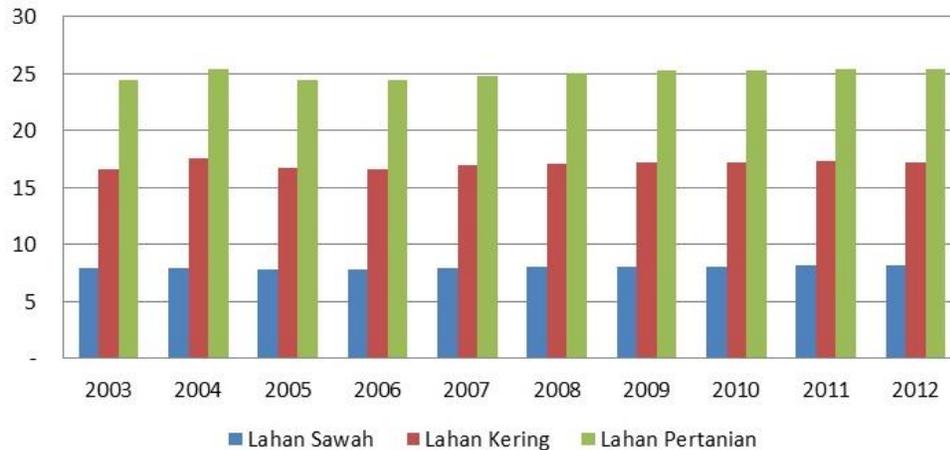
Turunnya jumlah rumah tangga petani merupakan salah satu indikator penting dari semakin rendahnya kesejahteraan petani, karena salah satu sebab utama beralihnya profesi para petani adalah karena tingkat penghasilan mereka yang rendah. Menurut BPS, pendapatan rumah tangga tani dari usaha di sektor pertanian rerata memang hanya Rp12,4 juta/tahun, atau hanya Rp1 juta/bulan.

Jumlah pendapatan tersebut hanya bisa menopang sepertiga kebutuhan rumah tangga petani, dimana sisanya harus disumbang oleh kegiatan di luar pertanian, seperti berdagang, bekerja kasar, atau menjadi tukang ojek. Fakta ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang disebut sebagai “masyarakat petani”, yakni mereka yang bekerja di sektor pertanian dan sebagian besar kebutuhan hidupnya dicukupi dari kegiatan tersebut, sebab sebagian besar petani dalam kenyataannya hidup dari sektor lain di luar pertanian.

Selain itu, pada Maret 2015 BPS juga mencatat, bahwa dari jumlah penduduk miskin 28,59 juta orang, sebanyak 62,75% tinggal di desa, dimana sebagian besarnya adalah petani. Data itu juga memberi gambaran bahwa sebagai produsen pangan, petani justru merupakan kelompok yang paling terancam oleh kerawanan pangan, karena kian sempitnya lahan dan rendahnya daya beli yang mereka miliki.

Tingginya angka konversi lahan juga merupakan indikator lain dari makin rendahnya kesejahteraan petani. Sebab, menurut sejumlah riset, ada tiga faktor utama yang menentukan tingginya laju konversi lahan, yaitu *faktor ekonomi* (seperti rendahnya kesejahteraan petani), *faktor sosial* (adanya pemecahan kepemilikan tanah, perubahan perilaku, rendahnya apresiasi terhadap petani, dan lain-lain), dan *regulasi pertanahan* (seperti mudahnya aturan alih fungsi lahan).

Perkembangan Luas Lahan Pertanian Indonesia 2003-2012 (dalam juta Hektar)



Kalau dilihat dari angka, rata-rata konversi lahan sawah di Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung sebesar 17.550 hektar per tahun. Sedangkan di Jawa dan Bali, angka rata-rata konversi lahannya masing-masing 7.923 hektar per tahun dan 1.000 hektar per tahun. Angka itu tentu saja tidak menggembirakan, apalagi Jawa berkontribusi terhadap 53% produksi pangan nasional.

Salah satu masalah penting yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani adalah soal kepemilikan lahan. Sekitar 56% penduduk pedesaan merupakan buruh tani, atau petani gurem, dengan kepemilikan tanah rata-rata di bawah 0,5 Ha. Menurut data BPS (2013), indeks gini tanah nasional juga mencapai angka 0,72, yang mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan dan penguasaan tanah masih sangat timpang.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kita memang membutuhkan reforma agraria. Ketersediaan lahan pangan per kapita Indonesia amat sempit, hanya 359 meter persegi untuk sawah (atau 451 meter persegi bila digabung lahan kering). Angka itu jauh di bawah Vietnam (960 meter persegi), Thailand (5.226 meter persegi), atau Cina (1.120 meter persegi).

Beban yang dipikul sektor pertanian semakin berat, karena menurut Sensus Pertanian 2013, sektor ini menampung lebih sepertiga angkatan kerja, dan lebih dari sepertiga pekerja sektor pertanian berusia lebih 54 tahun.

Perbandingan Luas Lahan Pertanian dengan Jumlah Penduduk di Beberapa Negara

Negara	Luas lahan pertanian (ribu ha)	Penduduk (ribu, tahun 2000)	Luas lahan per kapita (m²)
Argentina	33.700	37.040	9.100
Australia	50.304	19.153	26.100
Bangladesh	8.058	123.406	655
Brazil	58.865	171.796	3.430
Kanada	45.740	30.769	14.870
Cina	143.625	1.282.172	1.120
India	161.750	1.016.938	1.590
Indonesia ¹⁾	7.780	217.000	360
Thailand	31.839	60.925	5.230
USA	175.209	285.003	6.150
Vietnam	7.500	78.137	960
Indonesia ²⁾	9.788	217.000	450

Keterangan: ¹⁾ Luas sawah + lahan tadah hujan, tidak termasuk perkebunan

²⁾ Luas sawah + lahan tadah hujan + lahan kering, tidak termasuk perkebunan

Pendapatan Petani sebagai Kunci Kedaulatan Pangan

Sejauh ini problem kedaulatan pangan, yang terutama didominasi oleh soal perberasan, masih saja hanya selalu didekati dari sisi penawaran dan permintaan secara agregat. Dari sisi permintaan, untuk memperkecil jumlah konsumsi beras, misalnya, saran yang umumnya disampaikan adalah kita harus mengurangi konsumsi dan mengalihkannya pada varian bahan pangan lain. Sementara, pada sisi penawaran, selain didominasi oleh pendekatan perdagangan (baca: impor pangan), soal ini masih saja dirantai oleh urusan klasik, seperti masalah konversi lahan pertanian yang tinggi, serta tingkat kepemilikan lahan yang sangat kecil di kalangan petani.

Jika disimak, semua pendekatan dan ikhtiar yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan tersebut sangat sedikit sekali memperhatikan soal insentif yang diterima petani, padahal 60 persen dari petani produsen Indonesia adalah petani miskin.

Sebuah penelitian yang dilakukan di Boyolali, Jawa Tengah, menyebut bahwa petani hanya mendapatkan margin 15 persen saja dari harga penjualan, sementara distributor beras, yang didominasi oleh perusahaan penggilingan padi, bisa mendapatkan margin hingga 65 persen

(Surono, 2003). Padahal, insentif harga merupakan transmisi ekonomi yang sangat efektif mempengaruhi perilaku produksi petani.

Kalau kita membaca lagi pengalaman pada masa awal Revolusi Hijau dulu, pada kuartal kedua 1969, misalnya, kita pernah dikagetkan oleh naiknya produksi beras dari yang semula diperkirakan pemerintah hanya 10,5 juta ton, ternyata bisa melonjak hingga 11,14 juta ton. Berita kenaikan produksi beras waktu itu ramai menghiasi media massa. Ada banyak ahli, terutama ekonom, yang mengemukakan pendapat mengenai sebab-sebab kenapa hal itu bisa terjadi. Sebagian analisis mengemukakan bahwa kenaikan itu disebabkan oleh faktor alam, terutama hujan yang turun sepanjang tahun, sehingga membuat para petani bisa menanam dua hingga tiga kali pada masa itu.

Namun, sejumlah ekonom menolak penjelasan tersebut. Mereka mengajukan bahwa intensifikasi pertanianlah yang telah menyebabkan kenaikan produksi tersebut. Penggunaan pupuk yang massif, serta pemakaian bibit unggul, merupakan penjelasan yang paling banyak dikemukakan. Apalagi, Revolusi Hijau pada waktu itu memang baru saja memulai risalahnya di Indonesia. Pendek kata, kenaikan produksi beras adalah buah dari manajemen pembangunan, demikian menurut sementara ekonom. Pokoknya, silang pendapat mengenai sebab-sebab meningkatnya jumlah produksi beras masa itu ramai menghias halaman media.

Di tengah semua silang pendapat itu, hanya ada seorang ekonom yang mengajukan pandangan yang berbeda mengenai apa yang sedang terjadi. Menurutny, kenaikan produksi padi pada saat itu adalah dikarenakan membaiknya harga komoditas pertanian sepanjang periode sebelumnya. Membaiknya nilai tukar ini, menurutny, telah membuat para petani terpacu untuk meningkatkan produktivitasnya. Perbaikan harga menjadi daya rangsang yang luar biasa yang telah mendorong petani menanam padi. Ekonom itu tak lain adalah Dr. Mubyarto.

Jika kita mengulik persoalan di balik tingginya angka konversi lahan pertanian, yang mencapai seratus ribu hektare per tahun, tak ada penjelasan yang lebih tegas bahwa semua itu dilatarbelakangi oleh semakin kecilnya insentif yang diterima petani dari sektor pertanian, sehingga mereka harus memilih sektor penghidupan yang lain. Masalahnya, petani tidak pernah dihitung sebagai faktor penting dalam banyak diskusi soal ketahanan pangan.

Hingga saat ini, kebijakan harga beras di Indonesia selalu saja berorientasi kepada konsumen, dimana tujuan akhirnya adalah untuk menjamin tersedianya beras dalam jumlah yang cukup pada tingkat harga yang murah. Ini bisa dilihat dari model-model kebijakan perberasan yang dipilih oleh pemerintah, baik itu pada masa kolonial Belanda dulu maupun pemerintahan Republik setelah Proklamasi.

Secara garis besar, menurut Mubyarto, hingga 1969 kebijakan harga beras di Indonesia bisa dibedakan menjadi tiga periode, yaitu (1) masa kebijakan pangan murah (*the cheap food policy*), yaitu terhitung sejak masa kolonialisme Belanda hingga kira-kira 1959; (2) kebijakan “upah natura” (*the food wage policy*), yaitu selama periode inflasi dari 1959-1966; dan (3) kebijakan tekan-inflasi (*the “kill-inflation” policy*) dari 1966 hingga 1969. Ketiga bentuk kebijakan itu pada dasarnya sama-sama menitikberatkan pemihakan pada konsumen dan itu adalah sesuatu yang bermasalah.

Menurut Mubyarto, masalah pokok perberasan Indonesia tidak terletak pada bagaimana caranya “*menurunkan harga beras*”, melainkan pada bagaimana “*menyediakan beras*” di pasaran yang “*dapat dibeli*” oleh rakyat banyak. Artinya, berapapun tingkat harga beras, jika rakyat banyak memiliki daya beli (*purchasing power*), maka hal itu tentunya tidak akan menjadi persoalan. Dengan sendirinya, isu mengenai beras murah pun menjadi tidak relevan. Penghubungan soal produksi beras dengan daya beli petani inilah yang banyak absen dalam analisis mengenai soal perberasan dan ketahanan pangan hingga saat ini. Kita alpa bahwa dalam kaitannya dengan daya beli rakyat tani, daya beli mereka sangat terkait dengan tingkat harga dari *output* yang dihasilkannya, dan itu adalah beras.

Model argumentasi yang dibangun oleh Mubyarto ini, pada masa lalu pernah disebut sebagai “politik harga beras yang memakmurkan rakyat” oleh Mohammad Hatta. Menurut Hatta, kenaikan harga *output* hasil produksi desa, teristimewa padi dan beras, merupakan tiang dari politik-kemakmuran orang desa, dimana dengan surplus kemakmuran itu perekonomian desa akan dengan sendirinya membantu perkembangan perekonomian kota. Menurut cara pandang ini, perekonomian desa yang bertumpu pada sektor pertanian dianggap memainkan fungsi unik yang berbeda dengan fungsi yang dimainkan perekonomian kota. Surplus ekonomi yang terjadi di desa selalu akan merupakan faktor pendorong bagi perkembangan perekonomian kota, tapi hubungan itu tidak berlaku sebaliknya.

Industrialisasi Pertanian

Pembangunan ekonomi ke depan, di era otonomi politik dan desentralisasi ekonomi, tidak lagi dapat ditempuh hanya dengan program-program pemulihan (*recovery*) ekonomi semata, apalagi bertumpu pada pembangunan infrastruktur yang tidak jelas itu, tetapi memerlukan suatu strategi baru. Paling tidak ada tiga hal yang perlu dimiliki oleh strategi tersebut, yaitu (1) memiliki jangkauan pemecahan masalah yang luas serta efek pengganda yang besar; (2) mengandalkan penggunaan sumber daya domestik (*domestic resources based*) yang dikuasai oleh rakyat banyak; dan (3) memiliki visi dan orientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan usaha-usaha kecil menengah dan koperasi (Wijaya, 2002).

Upaya pengembangan sumberdaya domestik yang hanya menghasilkan produk primer saja tidak cukup untuk menopang pembangunan ekonomi modern. Perekonomian yang hanya bertumpu pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) demikian, dalam hal ini bersandar pada melimpahnya sumberdaya alam dan tenaga kerja, seharusnya sudah ditinggalkan. Oleh karena itu harus ada usaha untuk mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) melalui pengembangan industri hulu dan hilir di bidang pertanian.

Itu sebabnya, jika kita berbicara mengenai kedaulatan pangan, kita memerlukan program industrialisasi pertanian yang bersifat terpadu, yang di dalamnya mencakup paling tidak beberapa unsur pokok, seperti (1) reforma agraria, (2) industrialisasi pertanian/perdesaan, (3) transmigrasi, dan (4) penyaluran kredit pertanian/perdesaan melalui lembaga-lembaga kredit yang dikelola dan diusahakan oleh para petani sendiri. Di samping itu, industrialisasi pertanian

secara terpadu ini hanya akan bisa berlangsung dengan baik jika ditopang oleh kebijakan perdagangan yang juga mendukung sektor pertanian.

Posisi sentral sektor pertanian dan pentingnya proses industrialisasi yang bertumpu pada sektor pertanian bisa diuraikan dengan meminjam hasil studi yang dilakukan oleh Cohen dan Zysman mengenai struktur perekonomian Amerika Serikat. Stephen S. Cohen dan John Zysman, dalam bukunya, *Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy* (New York: Basic Books, 1987), menulis bahwa esensi dari perkembangan perekonomian tidak terletak pada pergeseran titik tumpu dari sektor pertanian ke sektor manufaktur, atau dari sektor manufaktur ke sektor jasa, sebagaimana yang lazim kita jumpai dalam teori-teori modernisasi, melainkan terletak pada hubungan dialektik antara apa yang mereka sebut sebagai sektor inti (*core sector*) dengan sektor pendukung (*supporting sector*). Dalam sebuah perekonomian yang sehat, sektor-sektor pendukung perekonomian harus selalu memiliki kaitan langsung dengan sektor inti.

Apa yang dimaksud dengan sektor inti dalam perekonomian Amerika oleh Cohen dan Zysman tidak lain adalah *sektor pertanian*.

Surplus yang terjadi di sektor inti, dalam hal ini pertanian, merupakan faktor utama yang akan mendorong munculnya industri hulu di sektor manufaktur, seperti industri pupuk dan petrokimia; juga menjadi faktor utama yang mendorong munculnya industri-industri hilir, seperti industri pengolahan bahan makanan dan sejenisnya; serta telah mendorong perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa.

Jadi, faktor penggerak inti perekonomian pada mulanya adalah sektor pertanian. Jika sektor inti mengalami kemunduran, maka sektor-sektor pendukung juga akan mengalami kemunduran. Berbeda dengan sektor inti yang bisa “menolong” perekonomian jika sektor pendukung mengalami kemunduran, maka kemunduran sektor inti *tidak bisa* ditolong oleh sektor pendukung, sebagaimana tergambar dari perekonomian Amerika dimana defisit perdagangan produk manufaktur tidak dapat diimbangi oleh surplus perdagangan produk jasa.

Persis di situ peran vital sektor pertanian tidak akan pernah bisa diabaikan. Ia merupakan soal hidup dan mati sebuah bangsa, bukan hanya karena ia berhubungan dengan produksi pangan, melainkan juga berhubungan dengan dinamika perekonomian sebuah bangsa secara umum.

Jakarta, Mei 2016

Kabag set. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam

ISNU PURWANTO, S.I.P., M.M.

NIP.19620313 198203 1 001

